

ILMU SOSIAL DI INDONESIA: PELUANG, PERSOALAN DAN TANTANGAN

Rochman Achwan¹

Abstract

Social science in Indonesia has enjoyed the luxury that has never been experienced in modern scientific history in the country. Nonetheless, this luxury has not been able to trail the development of social sciences achieved by neighboring countries. Using the concepts of social science's types, this article concludes that the development of professional social science and critical social science has far left behind the development of public and policies related social science. This disparity actually marked the poor-quality of our social science development. This writing also recommends the needs to construct national social science by focusing on the revitalization of scientific association and reorientation of the method of social scientist's thinking. By the time these steps are taken, Indonesian social scientists will be able to develop theories, concepts, and appropriate methodology within the contexts of Indonesian society. The national social science will become the amalgamation of Western social theories with local societal context.

Keywords: social science development, Indonesia, revitalization of scientific association, reorientation of social science method

Pendahuluan

Empat tahun yang lalu, Gerke dan Evers, dua sosiolog Jerman, menulis perkembangan ilmu sosial di Indonesia di jurnal berpengaruh *Sojourn volume 21 nomor 1, 2006*. Mereka memfokuskan pada persoalan internasionalisasi karya ilmiah ahli ilmu sosial Indonesia. Menurutnya, selama kurun waktu tiga puluh tahun (1970-2000), ahli ilmu sosial Indonesia yang menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal internasional

¹ Staf pengajar Departemen Sosiologi FISIP UI. Email: rochman.achwan09@ui.ac.id

jumlahnya paling kecil dibandingkan rekan-rekannya dari negara tetangga. Prosentase publikasi ahli ilmu sosial Indonesia di jurnal internasional (7,1%) jauh tertinggal dari ahli ilmu sosial Singapura (53,5%), Brunei (35,7%), Malaysia (25,1%), Filipina (24,1%), dan Thailand (18,8%).

Kesulitan internasionalisasi tersebut erat kaitannya dengan kedekatan ilmu pengetahuan ini dengan kekuasaan. Bila di masa lalu, ilmu sosial cenderung tunduk pada kekuasaan politik, di masa kini, ilmu sosial tunduk pada kekuasaan ekonomi (Hadiz dan Dhakidae, 2005). Ketertundukan pada kekuasaan tersebut telah mengakibatkan rapuhnya otonomi ilmu sosial dalam mengembangkan diri.

Sungguhpun produksi pengetahuan sosial lewat jurnal dan buku di tingkat nasional semakin berkembang, pernyataan ahli ilmu sosial tersebut merupakan peringatan keras terhadap ahli ilmu sosial Indonesia. Mengingat dimasa kini, di era demokrasi, ilmu sosial menikmati kemewahan yang belum pernah dialami dalam sejarah keilmuan modern negeri ini. Organisasi sosial politik, lembaga donor internasional, lembaga swadaya masyarakat, media, dan birokrasi negara memberi tempat relatif leluasa kepada sarjana dan ahli ilmu sosial untuk mengekspresikan pandangan dan keahliannya. Di tengah kemewahan ini, kita perlu mengajukan pertanyaan, mengapa sumbangan karya ilmiah ahli ilmu sosial Indonesia di panggung internasional begitu kecil? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendorong internasionalisasi tersebut?

Empat Tipe Ilmu Sosial

Artikel ini bertolak dari pandangan bahwa ilmu sosial bukanlah ilmu pengetahuan yang tunggal. Bila kita mengajukan pertanyaan dasar “ilmu untuk apa” dan “ilmu untuk siapa”, maka akan muncul empat tipe ilmu sosial. Empat tipe ilmu sosial ini merupakan perluasan konsep empat tipe sosiologi yang diperkenalkan oleh Burawoy (2004). Perluasan konsep ini penting mengingat sosiologi hanyalah salah satu ilmu sosial yang berfungsi sebagai lensa untuk memahami dan menjelaskan persoalan kemasyarakatan di Indonesia.

Keempat tipe ilmu sosial tersebut adalah ilmu sosial profesional, ilmu sosial publik, ilmu sosial kebijakan, dan ilmu sosial kritis. Perkembangan ilmu sosial yang sehat di suatu negara ditandai oleh keseimbangan yang saling melengkapi antar keempat tipe ilmu sosial

tersebut. Keseimbangan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perkembangan berlebihan salah satu tipe dan mengorbankan tipe ilmu sosial yang lain. “Over-professionalisation” di Amerika Serikat dan “over-marketisation” di Rusia dalam ilmu sosial, misalnya, berturut-turut mengorbankan perkembangan ilmu sosial publik dan ilmu sosial profesional. *Over-professionalisation* menuntut setiap ahli ilmu sosial memiliki tanggung jawab akademis dengan membuktikannya lewat publikasi yang sebelumnya telah dinilai oleh *community of scholars* di jurnal ilmiah. Sedangkan *Over-marketisation* ditandai dengan pertanggungjawaban ahli ilmu sosial bukan kepada *community of scholars* melainkan kepada pemberi pekerjaan penelitian baik kalangan pemerintah maupun swasta.

Selama hampir sepuluh tahun terakhir, Burawoy, pencetus teori sosiologi publik, mengadvokasikan pentingnya peran sosiologi bukan hanya dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial melainkan juga dalam memberi sumbangan berharga terhadap kemanusiaan dan peradaban. Ia mengembangkan model pembagian kerja sosiologi untuk mencapai dua tujuan tersebut. Model tersebut berisi pasangan ganda terdiri dari pasangan pengetahuan (*pairing knowledges*) dan pasangan masyarakat (*pairing audiences*). Berikut model yang telah diperluas oleh penulis.

Matriks
Empat Tipe Ahli Ilmu Sosial

Pengetahuan	Masyarakat Akademis	Masyarakat Non Akademis
Instrumental	Ahli Ilmu Sosial Profesional	Ahli Ilmu Sosial Kebijakan
Refleksif	Ahli Ilmu Sosial Kritis	Ahli Ilmu Sosial Publik

Sumber: Diperluas dari Michael Burawoy (2008).

Matriks di atas menunjukkan bahwa masing-masing ahli ilmu sosial memiliki jenis pengetahuan, dasar-dasar legitimasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Ahli ilmu sosial profesional bertolak dari pengetahuan instrumental dalam menemukan kebenaran ilmiah. Mereka menguasai teori dan metodologi ilmu sosial yang berfungsi sebagai lensa dan alat penjelas persoalan kemasyarakatan yang ditelitinya. Hasil penelitiannya mereka terbitkan di jurnal ilmiah setelah sebelumnya dinilai oleh *community of scholars* atau *blind peer reviewers*. Semakin berpengaruh jurnal tersebut semakin tinggi reputasi ahli ilmu

sosial tersebut. Dengan demikian, publikasi di jurnal ilmiah merupakan dasar legitimasi sekaligus pertanggungjawaban akademis setiap ahli ilmu sosial profesional.

Ahli ilmu sosial kebijakan juga memiliki penguasaan teori dan metodologi sosial. Namun dasar legitimasi dan pertanggungjawaban hasil penelitiannya ditentukan oleh pemberi pekerjaan baik kalangan pemerintah maupun swasta. Otonomi ahli ilmu sosial ini sering menjadi taruhan karena campur tangan mendalam pemberi pekerjaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

Ahli ilmu sosial publik menguasai pengetahuan sosial reflektif, jenis pengetahuan yang kualitasnya berbeda-beda antar satu ahli dengan ahli yang lain. Pengetahuan mereka bisa saja melintasi penguasaan teori dan metodologi atau sebaliknya sekedar pengetahuan berdasarkan akal sehat atau *common sense*. Ahli ilmu sosial tipe ini dapat menyuarakan pandangannya lewat publikasi di surat kabar harian, mingguan ataupun buku yang dapat dicerna oleh masyarakat non akademis (*traditional public social scientists*). Mereka juga dapat bekerja sama dengan masyarakat mengorganisasi gerakan sosial ataupun pemberdayaan ekonomi (*organic public social scientists*). Dasar-dasar legitimasi dan pertanggungjawaban ahli ilmu sosial ini ditentukan publik atau masyarakatnya.

Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah ahli ilmu sosial kritis. Tugas utama mereka adalah mempersoalkan asumsi, dasar-dasar teori dan metodologi yang dikembangkan oleh ahli ilmu sosial profesional. Itulah sebabnya perkembangan ilmu sosial yang dinamis selalu mensyaratkan kehadiran ilmu sosial kritis. Karena dengan cara ini, teori dan metodologi dapat diperbarui dan ditolak.

Idealnya, perkembangan ilmu sosial yang sehat di suatu negara ditandai oleh keseimbangan dinamis antar keempat tipe ilmu sosial tersebut. Di dalam keseimbangan ini, ilmu sosial profesional memainkan peran penting sebagai tulang punggung perkembangan tipe ilmu sosial lain. Taiwan, adalah contoh ideal dari negara yang mengalami perkembangan ilmu sosial yang sehat. Di bawah naungan asosiasi ilmu sosial setempat, para ahli ilmu sosial profesional melakukan serentetan penelitian di mana hasil penelitian tersebut bukan saja dipublikasi di jurnal internasional namun juga digunakan oleh pemerintah untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan Cina (Mau-kuei Chang et al., 2010), dan menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya setempat dalam

program mendorong demokrasi². Taiwan adalah contoh ideal di mana ahli ilmu sosial profesional sekaligus menjadi ahli ilmu sosial kebijakan dan publik.

Ilmu Sosial di Indonesia

Dalam mempelajari ilmu sosial di Indonesia, kita perlu memfokuskan perhatian pada kekuatan (*forces*) dan kecenderungan (*trends*) perkembangan disiplin ilmu ini. Kekuatan menunjuk pada dominasi salah satu atau beberapa tipe disiplin ilmu, sedangkan kecenderungan, erat kaitannya dengan perkembangan signifikan dari kekuatan tersebut. Kekuatan dan kecenderungan selalu berkaitan dalam masyarakat moderen (Beck dan Beck-Gernsheim, 1995). Sebagai contoh, tipe ilmu sosial apa yang paling mendominasi dan bagaimana kecenderungannya di Indonesia.

Dengan mempelajari kekuatan dan kecenderungan ini, kita dapat menilai kesinambungan dan perubahan ilmu sosial di Indonesia. Dalam kaitan ini, pertanyaan penting yang patut diajukan adalah sebagai berikut. Apakah hubungan antar tipe-tipe ilmu sosial tersebut tetap sama atau telah berubah? Bila hubungan tersebut berubah maka perubahan ini dapat merembes dan memasuki wilayah kegiatan produksi pengetahuan sosial. Bila perubahan ini signifikan, maka akan terjadi perubahan mendasar pola-pola produksi keilmuan.

Lanskap ilmu sosial di Indonesia telah mengalami perubahan. Di masa Orde Baru, perkembangan ilmu sosial ditandai oleh hubungan yang kurang serasi antara ilmu sosial profesional dan ilmu sosial kebijakan disatu pihak dengan ilmu sosial kritis dan ilmu sosial publik di lain pihak. Mayoritas ilmuwan sosial dari universitas dengan kecanggihan metode penelitian dan analisa yang dimilikinya cenderung menggunakan paradigma modernisasi dan teori pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Tidak sedikit ilmuwan sosial profesional ini berkecimpung di lembaga pemerintahan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan ekonomi negara. Di kelompok profesional ini, juga muncul sejumlah ilmuwan sosial publik yang menyuarakan keprihatinan mengenai dampak negatif pembangunan ekonomi.

²Percakapan dengan Hsin-Huang Michael Hsiao, sosiolog Taiwan.

Perhimpunan keilmuan seperti Himpunan Pencinta dan Pemerhati Ilmu Sosial Indonesia (HIPIS) menyuarakan keprihatinan ini dalam sidang tahunan. Lewat kongres dengan tema “Kemiskinan Struktural”, HIPIS menyerang kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah Orde Baru yang mereka anggap kurang menaruh perhatian pada dimensi-dimensi kemanusiaan. Pandangan ini tentu membawa pengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Pengaruh ini, sekalipun bukan satu-satunya, mendorong munculnya strategi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada pemerataan pendapatan.

Ilmu sosial kritis dan ilmu sosial publik-organik berkembang di luar universitas. Mayoritas pendukung ilmu ini berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Dipengaruhi oleh paradigma ketergantungan, mereka mempersoalkan dasar-dasar asumsi paradigma modernisasi. Mereka juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat melakukan penelitian dan rencana aksi bersama. Disamping itu, mereka juga menerbitkan jurnal dan buku yang membahas persoalan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia (Ganie-Rochman dan Achwan, 2005).

Ilmu sosial di masa Orde Baru ditandai oleh perkembangan yang menggalakan antar tipe-tipe ilmu sosial. Namun, perkembangan ini tidak ditopang oleh hubungan yang erat antar mereka. Akibatnya semua tipe ilmu sosial tidak mengalami penyempurnaan ataupun pembaruan. Era Orde Baru juga ditandai, seperti dilaporkan oleh studi Evers dan Gerke, oleh kecilnya internasionalisasi hasil studi ilmuwan sosial Indonesia.

Di masa kini, di era demokrasi, produksi pengetahuan sosial mengalami “booming”. Perusahaan swasta dan organisasi politik dengan tujuan yang berbeda memerlukan jasa lembaga survei pendapat umum. Lembaga donor internasional memerlukan sarjana ilmu sosial untuk melakukan survei guna membantu pemerintah membangun pemerintahan yang baik. Barangkali sudah ratusan juta dolar Amerika Serikat dikucurkan untuk mendatangkan sarjana ilmu sosial dari luar maupun dalam negeri untuk meneliti, melatih, dan melaksanakan program “Good Governance”. Mass media juga memerlukan sarjana ilmu sosial sebagai pakar untuk membicarakan dan mendiskusikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Setiap malam, penonton Indonesia dapat menyaksikan perbincangan ini di hampir semua saluran televisi swasta.

Musim semi produksi pengetahuan sosial kini sedang berada di titik puncak.

Situasi konstruktif ini menandai kemunculan hubungan antar pendukung tipe-tipe ilmu sosial. Pendukung ilmu sosial profesional yang umumnya bekerja di universitas dan lembaga penelitian dapat menjadi pakar, peneliti dan pelatih utama dalam kegiatan penelitian kebijakan, pelatihan, dan advokasi yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara maupun partai politik. Hubungan kerja sama ini terjadi di pelbagai wilayah kajian antara lain dalam perumusan rancangan undang-undang, program kerja pelbagai kementerian maupun kampanye pemilihan Presiden dan kepala daerah. Begitu juga sebaliknya, pendukung ilmu sosial kebijakan dan publik yang umumnya bekerja di lembaga pemerintahan, swasta, dan LSM dapat dengan mudah diundang sebagai dosen tamu atau melanjutkan studinya di universitas.

Namun terjalannya hubungan yang harmonis antar tipe-tipe ilmu sosial ini ditandai oleh hilangnya tipe ilmu sosial kritis. Bila ilmu sosial profesional merupakan “jantung”, maka ilmu sosial kritis merupakan “hati” dari perkembangan ilmu sosial secara keseluruhan. Di negara di mana ilmu sosial berkembang pesat, ilmu sosial kritis memainkan peran penting dalam mempertanyakan asumsi, teori, dan pertanyaan penelitian yang diajukan oleh ilmu sosial profesional. Pertanyaan-pertanyaan ini sering melahirkan paradigma baru dalam ilmu sosial.

Hilangnya “hati” ilmu sosial ini menandai keengganan ahli ilmu sosial Indonesia mempertanyakan kekuatan dan kelemahan teori atau konsep demokrasi, “Good Governance”, “Civil Society”, dan “Social Capital”. Teori atau konsep tersebut seolah-olah tidak perlu diganggu gugat dan oleh karena itu dapat diterapkan untuk mempelajari masyarakat dan politik Indonesia. Keengganan ini menyalahi salah satu prinsip dalam memproduksi ilmu pengetahuan sosial.

Ilmu pengetahuan tidak mengenal kebenaran abadi dan tidak mengenal kepastian. Ilmu pengetahuan ada justru karena terus menerus direvisi. (Burawoy, 2009)

“Monocropping” atau menerapkan teori atau konsep Barat tanpa memperhitungkan konteks kemasyarakatan setempat (Evans, 2003) tidak dapat memperkaya ilmu sosial dan tidak dapat memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Pengalaman Rusia dan Mexico menyajikan betapa tragisnya “monocropping” di dua negara tersebut. Politik privatisasi Rusia di era Presiden Yeltsin diterapkan bukan dari hasil studi

yang mempertimbangkan konteks ekonomi dan politik negara tersebut melainkan hasil dari penerapan konsep privatisasi di Barat. Akibatnya, seperti dilaporkan oleh studi Stuckler dkk yang dimuat oleh jurnal ilmiah berpengaruh, *Lancet* (2009), angka kematian tertinggi dan angka harapan hidup terendah justru terjadi di era Yeltsin. Privatisasi telah mendorong meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan pada gilirannya kematian. Kebijakan ekonomi tanpa memperhitungkan konteks kemasyarakatan dapat membawa tragedi. Pencangkokan privatisasi Barat di Mexico juga telah menimbulkan perlawanan kalangan serikat buruh dan manajemen perusahaan negara. Perlawanan tersebut mengakibatkan terusnya Presiden Salinan dari kursi kepresidennya (Portes, 2006).

Sebaliknya, pengalaman Indonesia memberi variasi lain dari pandangan Evans. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terjadi di beberapa daerah seperti di Kebumen, Solo, Tarakan, dan Solok, umumnya tidak sepenuhnya mengikuti preskripsi “Good Governance” yang ditawarkan oleh lembaga donor internasional. Keberhasilan ini dicapai justru karena kepemimpinan Pemerintah Daerah, faktor yang kurang diperhitungkan dalam teori “Good Governance”.

Stagnasi Internasionalisasi Ilmu Sosial

Hubungan harmonis antar tipe ilmu sosial ternyata belum mampu mendorong internasionalisasi karya-karya akademis ahli ilmu sosial Indonesia. Sungguhpun penulis mengakui, dalam tahun-tahun terakhir ini mulai banyak karya mereka diterbitkan di jurnal internasional, namun secara keseluruhan presentase mereka sangat kecil dibandingkan dengan total populasi sarjana ilmu sosial Indonesia. Apalagi bila prosentase tersebut kita bandingkan dengan prosentase sarjana ilmu sosial dari negara tetangga yang berhasil menerbitkan karyanya di jurnal internasional. Indonesia, seperti laporan studi Evers dan Gerke, barangkali masih tetap dikelompokkan kedalam ‘Liga terkebelakang’ bersama Vietnam, Laos, dan Kamboja dalam internasionalisasi karya akademik mereka. Ketiga negara yang terakhir wajar masuk dalam ‘liga’ ini karena mereka baru saja memulai pembangunan ekonomi setelah sebelumnya didera oleh perang berkepanjangan.

Mengapa jurnal internasional dan mengapa bukan jurnal nasional sebagai salah satu indikator kunci dalam menilai perkembangan ilmu sosial di Indonesia? Ilmu sosial – dan malahan setiap disiplin ilmu pengetahuan – berkembang tanpa mengenal batas-batas kedaulatan

negara. Jurnal internasional yang baik memiliki *community of anonymous scholars* yang berdomisili dan bekerja di pelbagai negara. Mereka disebut *scholars* bukan karena bergelar profesor atau doktor, tetapi karena karya-karya mereka – setelah lolos dari evaluasi *community of anonymous scholars* sebelumnya – patut diterbitkan di jurnal internasional yang baik. Dengan demikian, publikasi karya ilmiah di jurnal internasional yang baik merupakan pertanggungjawaban akademis seseorang disebut sebagai ahli, pakar atau *scholar*. Pertanggungjawaban akademis ini biasanya ditujukan kepada ahli ilmu sosial profesional yang bekerja di universitas dan lembaga-lembaga penelitian yang mapan. Karena mereka dinilai sebagai orang yang paling cakap dalam memahami dasar-dasar filosofi teori sosial, perumusan tema, pertanyaan dan metodologi penelitian. Pertanggungjawaban ini juga berlaku universal bagi sarjana ilmu sosial profesional di benua Afrika, Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin.

Sejauh ini evaluasi terhadap jurnal nasional di Indonesia ditentukan oleh lancar dan tidak lancarnya penerbitan. Evaluasi substantif menyangkut ketersediaan ‘peer reviewers’ yang handal, terbitannya dikutip oleh siapa dan di mana, belum menjadi tradisi penilaian produksi pengetahuan sosial. Oleh karena itu jurnal nasional belum mampu menjadi “benchmark” ilmu sosial di Indonesia. Namun demikian, dewasa ini terdapat sejumlah jurnal nasional yang diasuh oleh ahli ilmu sosial lulusan universitas terkemuka di Barat dan Indonesia. Mereka sering melakukan penelitian sosial, menghadiri konferensi internasional dan menerbitkan karya-karyanya di Indonesia dan luar negeri. Mereka memiliki dedikasi yang tinggi dalam mendorong perkembangan ilmu sosial yang lebih bermutu.

Para sarjana ilmu sosial ini dapat membentuk *community of scholars* yang dapat bertugas menjadi *gate-keepers* mutu produksi pengetahuan sosial di Tanah Air. Di tengah-tengah “revolusi” jurnal ilmiah yang kini sedang terjadi di tingkat internasional – munculnya lusinan jurnal-jurnal baru, dan berubahnya frekuensi penerbitan dari kuartal menjadi dua bulanan – ditambah dengan ketersediaan dana penelitian dari pemerintah, swasta dan organisasi internasional, maka tidaklah berlebihan bila kelak Indonesia memiliki jurnal nasional ilmu sosial yang bermutu.

Melemahnya Asosiasi Keilmuan

Berbeda dengan zaman Orde Baru, kini asosiasi keilmuan khususnya di bidang ilmu sosial mengalami kelesuan bahkan cenderung antara ada dan tidak ada (*hibernate*). HIPPIS yang dimasa Orde Baru memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan politik negara sekaligus sebagai ajang tahunan pertemuan ahli ilmu Sosial Indonesia, kini sudah tidak terdengar lagi kegiatannya. Keadaan yang sama juga dialami oleh Asosiasi Sosiologi Indonesia (ISI).

Kedua asosiasi keilmuan ini, dimasa lalu, dikelola oleh ahli ilmu sosial profesional. Sungguhpun beberapa dari mereka memiliki kedekatan dengan salah satu pusat kekuasaan politik negara, asosiasi ini tetap memiliki ruang untuk menyuarakan keresahan ekonomi dan politik yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya asosiasi ini, terutama HIPPIS, dapat memainkan peran penting dalam menyeimbangkan tipe-tipe ilmu sosial yang ada. Sarjana ilmu sosial profesional, publik, kebijakan dan bahkan sarjana ilmu sosial kritis dapat bertemu dan saling tukar menukar pandangan di acara tahunan pertemuan ilmu sosial.

Kini, di era demokrasi, lanskap politik keilmuan telah berubah. Asosiasi ilmu sosial telah kehilangan perannya justru di tengah kemewahan lingkungan institusional yang ada. Di tengah kemewahan ini, sarjana ilmu sosial membangun hubungan individual dengan media massa, partai politik, birokrasi, organisasi donor internasional, LSM, dan swasta. Mereka diminta memberikan pandangannya sesuai dengan keahliannya mengenai pelbagai masalah sosial dan politik.

Perkembangan ini tentu positif mengingat tugas ilmu sosial adalah memberikan sumbangan berharga terhadap kemajuan masyarakat. Namun kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban akademis terutama bagi ahli ilmu sosial profesional Indonesia. Pertanyaan ini penting mengingat ilmu sosial profesional merupakan jantung ilmu sosial. Tanpa pertanggungjawaban akademis, ilmu sosial profesional akan berubah menjadi *ilmu sosial gelembung*. Pandangan dari jenis ilmu sosial ini mirip gelembung, tidak ada isinya, timbul dan tenggelam, ditelan oleh angin perubahan.

Pertanggungjawaban akademis ini juga penting, mengingat di zaman “audit society” dewasa ini, setiap profesi dituntut mempertanggungjawabkan keahliannya. Politisi, konsultan, dan birokrat

dituntut mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya dalam jangka waktu tertentu. Pertanggungjawaban akademis ahli ilmu sosial profesional diukur dari publikasi karya mereka di jurnal dengan tingkat kualitas yang berbeda.

Afrika Selatan (Uys, 2010), negara dengan tingkat perkembangan ilmu sosial yang relatif sama dengan Indonesia misalnya, menggolongkan ahli ilmu sosial profesional menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, adalah ahli ilmu sosial berkualitas internasional karena mereka berhasil mempublikasikan karyanya di jurnal internasional. Kelompok kedua, berkualitas nasional, menerbitkan karyanya di jurnal nasional dan belum mampu menerbitkannya di jurnal internasional.

Pengelompokan ini membawa konsekuensi dengan “rating” universitas atau lembaga penelitian di mana mereka bekerja. Semakin banyak ahli ilmu sosial berkelas internasional, semakin tinggi rating universitas tersebut. Tingginya rating universitas atau lembaga penelitian memungkinkan mereka memperoleh kepercayaan dari lembaga negara, swasta, dan donor internasional untuk melakukan penelitian dan memberikan jasa kepenasehatan (*advisory services*).

Singapura³, negara paling maju di bidang ilmu sosial di Asia Tenggara, menggunakan kriteria yang jauh lebih berat di bandingkan dengan Afrika Selatan. Singapura tidak mengenal jurnal nasional. Semua jurnal ilmiah bertaraf internasional. Pertanggungjawaban akademis ahli ilmu sosial disana dinilai dari, pertama, di jurnal apa mereka menerbitkan karya ilmiahnya. Semakin tinggi kualitas jurnal tersebut, semakin tinggi pula kualitas ahli ilmu sosial tersebut. Kedua, karyanya tersebut dikutip oleh siapa. Apakah dikutip oleh sarjana terkenal atau kurang terkenal. Pertanggungjawaban akademis ahli ilmu sosial memungkinkan terhindar dari suasana tirani yang menyelimuti dunia keilmuan.

Dari uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ilmu sosial di era demokrasi ditandai oleh dominasi kekuatan ilmu sosial publik dan kebijakan. Dominasi ini cenderung berkembang pesat melintasi perkembangan ilmu sosial profesional dan ilmu sosial kritis. Ketidakseimbangan perkembangan ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan akademis, keadaan di mana ahli ilmu sosial Indonesia cenderung mengkonsumsi konsep dan teori ilmu sosial Barat tanpa

³Percakapan dengan Vedi R. Hadiz, Profesor Sosiologi Universitas Nasional Singapura.

mempersoalkannya. Mereka enggan mempertanyakan ataupun berdialog dengan teori atau konsep ilmu sosial Barat yang mereka gunakan ketika melakukan pengamatan dan penelitian sosial.

Bila keengganan ini terus berlanjut, kita tidak akan pernah mampu mempertanyakan, mengkritik, dan memperkaya konsep ilmu sosial Barat agar sesuai dengan konteks masyarakat dan politik Indonesia. “Thinking out of box” – berfikir melintasi konsep ilmu sosial Barat dengan mempertimbangkan konteks masyarakat dan politik setempat - harus menjadi prinsip kerja ahli ilmu sosial Indonesia di masa depan. Dengan cara berfikir semacam ini, mereka dapat memperbaiki dan memperkaya konsep “Good Governance”, “Civil Society”, “Demokrasi”, dan “Social Capital” sehingga konsep tersebut sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Membangun Ilmu Sosial Nasional

Mungkinkah Indonesia memiliki ilmu sosial nasional di masa mendatang? Kondisi-kondisi apa yang diperlukan agar kemunculan ilmu sosial nasional dapat menjadi kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh ahli ilmu sosial Indonesia. Ilmu sosial nasional adalah gabungan dari keseimbangan antar tipe-tipe ilmu sosial, di mana ilmu sosial profesional memainkan peran penting sebagai ‘jiwa dan energi’ perkembangan tipe ilmu sosial lain. Ilmu sosial profesional semacam ini ditandai oleh keberhasilannya dalam melakukan amalgamasi, bukan *monocropping*, antara teori dan konsep ilmu sosial Barat dengan kenyataan kongkrit masyarakat, ekonomi, dan politik Indonesia. Kemunculan ilmu sosial semacam ini - bila dipublikasi di jurnal nasional dan internasional berpengaruh - bukan hanya memberikan sumbangan akademis di tingkat dunia, namun juga sumbangan praktis dalam menjawab persoalan politik dan kemasyarakatan di Indonesia.

Peluang kemunculan ilmu sosial ini sesungguhnya terbentang luas. Disamping kemewahan yang kini sedang dinikmati, Kementerian Pendidikan Nasional telah dan sedang memberikan dukungan pendanaan di bidang penelitian, partisipasi konferensi internasional, dan publikasi hasil penelitian sosial. Dukungan yang sama juga diberikan oleh universitas dan lembaga penelitian berpengaruh, seperti UI, LIPI dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kini, peluang tersebut sepenuhnya berada di tangan ahli dan sarjana ilmu sosial Indonesia. Bagi mereka yang berketetapan hati memimpikan kemunculan ilmu sosial

nasional yang berkualitas, bukan *ilmu sosial gelembung*, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini hasil dari refleksi penulis sebagai pengajar dan aktivis asosiasi sosiologi. Oleh karena itu pemikiran ini hanya berlaku untuk bidang studi tersebut.

Revitalisasi Asosiasi Ilmu Sosial

Inti dari revitalisasi ini, terutama Ikatan Sosiologi Indonesia, menyangkut pembenahan organisasi yang lebih berorientasi pada penguatan sosiologi profesional. Karena penguatan ini akan dengan sendirinya mendorong perkembangan yang sehat sosiologi publik, sosiologi kebijakan bahkan sosiologi kritis. Pembenahan organisasi ini menyangkut fasilitasi dan pemberian arah perkembangan penelitian sosial dan publikasi jurnal akademis. Pengurus ikatan keilmuan ini dapat membentuk *community of scholars* yang bertugas membentuk komite penelitian sesuai dengan sub disiplin sosiologi ataupun berdasarkan topik yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Anggota komite penelitian ini adalah ahli dan sarjana sosiologi seluruh Indonesia. Mereka dapat membentuk komite penelitian di kota, provinsi atau tempat kerja mereka masing-masing. Setiap dua tahun sekali, komite-komite penelitian dapat berkumpul mendiskusikan hasil penelitiannya di Pertemuan Sosiologi Nasional. Dari pertemuan inilah, ikatan keilmuan ini dapat menseleksi makalah bermutu dan diterbitkan di jurnal yang dikelolanya.

Disamping itu, ikatan keilmuan juga perlu membangun kerjasama dengan asosiasi keilmuan sejenis di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama ini penting terutama agar tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu sosial di tingkat internasional. Keanggotaan dalam *Internasional Sociological Association* misalnya, memungkinkan setiap anggota ikatan sosiologi Indonesia dapat ikut ambil bagian dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh komite penelitian mereka.

Mendorong Orientasi Berfikir Ke Arah “Thinking Out of Box”

Ilmu pengetahuan sosial akan berkembang justru karena tidak mengenal kebenaran abadi. Oleh karena itu hasil penelitian sosial terdahulu perlu dikritik, disempurnakan atau ditolak oleh hasil penelitian sesudahnya. Cara kerja yang bersifat skeptis ini hanya dapat dilakukan bila sarjana dan ahli ilmu sosial mengadopsi orientasi berfikir “thinking out of box”. “Thinking out of box” adalah cara berfikir melintasi teori dan

konsep ilmu sosial Barat, serta melintasi peristiwa sosial di tingkat mikro maupun makro dalam proses penelitian.

Berfikir multi dialog dalam melaksanakan penelitian sosial menjadi tidak terelakkan (Burawoy, 2009). Peneliti perlu menggunakan teori atau konsep ilmu sosial Barat dalam proses penelitian. Namun keperluan ini bukan sepenuhnya untuk menerapkannya melainkan menjadi pedoman sekaligus mempertanyakan terus menerus kebenarannya lewat data yang dikumpulkan di lapangan. Misalnya, konsep modal sosial dari Barat sepenuhnya mengandalkan pada jaringan hubungan sosial antar individu dan kelompok. Namun Nan Lin (2001), sosiolog Taiwan, lewat penelitiannya memperbaiki konsep tersebut dengan menambah dimensi kekuasaan atau *resources*.

Konsep modal sosial bersifat ringkih (*thin*) dan menghindari dari kompleksitas hubungan sosial yang lekat dengan makna lokal (*thick*) agar supaya dapat digunakan di mana-mana (Sato, 2010: 197).

Peneliti juga perlu berdialog – bukan sekedar melakukan wawancara mendalam – dengan kelompok masyarakat yang dipelajarinya. Berdialog berarti bersama-sama merumuskan isu atau peristiwa sosial yang menjadi perhatian utama di masyarakat. Rumusan isu-isu tersebut dianalisa dengan memperhitungkan dinamika konteks makro atau kebijakan. Sebagai contoh, radikalisasi keagamaan dapat saja muncul bukan karena ideologi melainkan karena kesulitan kelompok sosial tertentu memperoleh akses di bidang ekonomi, politik dan pendidikan. Kesulitan akses ini erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang sedang berjalan.

Memperkaya Kajian Wilayah

Sosiologi, adalah salah satu program studi di Universitas di Indonesia yang tergolong aktif dalam mendorong kemunculan ilmu sosial nasional. Program studi ini, terutama di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, menjadi salah satu pilihan bagi calon sarjana ilmu sosial profesional, publik, dan kebijakan. Didukung oleh staf pengajar yang kuat lulusan luar negeri dan dalam negeri, program studi sosiologi memiliki kelebihan dalam penguasaan teori sosial klasik dan kontemporer serta metode penelitian sosial. Ketiga komponen pengajaran ini merupakan elemen vital perkembangan ilmu sosial profesional.

Yang perlu ditingkatkan adalah mengaitkan kedua teori tersebut dengan kajian wilayah. Kajian akademis mengenai Indonesia dan Asia

yang diterbitkan oleh jurnal dan buku perlu mendapat tempat yang lebih besar. Dengan cara ini, sarjana ilmu sosial dapat melibatkan diri dalam *academic discourse* mengenai tema-tema penting di Asia.

Memperkuat Online Database

Online database merupakan koleksi pelbagai jurnal internasional yang dikelola oleh perusahaan dan dapat diakses oleh pengguna dengan cara menjadi pelanggan. Namun, universitas dan lembaga penelitian di Indonesia jauh tertinggal dengan negara tetangga dalam mengakses jumlah dan kebaruan jurnal yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Bila ahli ilmu sosial Singapura dapat mengakses semua jurnal internasional hingga tahun terakhir, ahli ilmu sosial Indonesia terbatas hanya jurnal tertentu dan terbit hingga tahun tertentu. Situasi ini tentu membatasi ahli ilmu sosial Indonesia dalam mengikuti perkembangan teori, konsep, dan hasil penelitian mutakhir di tingkat internasional.

Untuk mengatasi hambatan ini, para pengelola universitas dan lembaga penelitian yang sudah mapan perlu menggalang dana bersama – bukan menjadi pelanggan sendiri-sendiri – untuk menjadi pelanggan kolektif *online* database. Dengan cara ini, masyarakat akademis dapat memiliki akses yang jauh lebih besar. Cara ini sudah dilakukan oleh universitas-universitas di Belanda dan Jerman.

Pembenahan kelembagaan, dorongan orientasi “thinking out of box”, dan penguatan teknologi informasi merupakan tiga langkah penting kemunculan ilmu sosial nasional di Indonesia. Bila langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia akan menyaksikan kemunculan ilmu sosial profesional yang kuat, yang mampu memperkaya dan memperbarui teori dan konsep ilmu sosial Barat. Kuatnya tipe ilmu sosial ini akan memberi energi perkembangan ilmu sosial publik, ilmu sosial kebijakan, dan ilmu sosial kritis di Tanah Air.

Daftar Pustaka

- Beck, Ulrich., Beck-Gernsheim, Elisabeth., 1995. *The Normal Chaos of Love*, London: Polity Press.
- Burawoy, Michael., 2009. *The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition*, Berkeley: University of California Press.

- Burawoy, M. 2004. 'Public Sociologies: Contradictions, Dilemmas, and Possibilities'. *Social Forces* (82) 4.
- Evans, Peter., 2003. "Development as Institutional Change: The Pitfalls of Monocropping and Potentials of Deliberation", Unpublished paper, University of California, Berkeley
- Ganie-Rochman, Meuthia., Achwan, R., 2005. 'Inclusion and Exclusion: NGOs and Critical Social Knowledge', in Vedi R Hadiz and Daniel Dhakidae (eds). *Social Science and Power in Indonesia*, Singapore: Equinox and ISEAS.
- Gerke, S. and Evers, H.D., 2006. 'Globalizing Local Knowledge: Social Science Research on Southeast Asia, 1970-2000'. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 21 (1).
- Hadiz, V. R., Dhakidae, D., (eds), 2005. "Introduction", in Vedi R Hadiz and Daniel Dhakidae (eds), *Social Science and Power in Indonesia*, Singapore: Equinox and ISEAS: 1-30.
- Mau-Keui Chang et al, 2010. "Indigenization, Institutionalization, and Internationalization: Tracing the Paths of the Development of Sociology in Taiwan", in Burawoy, Michael at al, *Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology vol 2*, Joint Publication of the Institute of Sociology, Taiwan and Council of National Associations of the International Sociological Association, 2010.
- Lin, N., 2001. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*, Cambridge University Press, New York.
- Portes, Alejandro., 2006. "Institutions and Development: A Conceptual Reanalysis", *Population and Development Review* 32 (2).
- Sato, Yoshimichi., 2010. "Are Asian Sociologies Possible? Universalism versus Particularism", in Burawoy, Michael at al, *Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology vol 2*, Joint Publication of the Institute of Sociology, Taiwan and Council of National Associations of the International Sociological Association.
- Stuckler, David., King, L., McKee, M., 2009. "Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis", *the Lancet*, Vol. 373, Issue 9661.

Uys, Tina. 2010. "Resistance to Rating: Resource Allocation, Academic Freedom and Citizenship", in Burawoy, Michael et al, *Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology vol 1*, Joint Publication of the Institute of Sociology, Taiwan and Council of National Associations of the International Sociological Association.

